

Indonesia:

Sistem informasi dan layanan pasar tenaga kerja



International
Labour
Organization

Informasi tentang pasar tenaga kerja¹

Data tentang sistem informasi pasar tenaga kerja merupakan sumber informasi penting terkait bidang pendidikan dan perencanaan keterampilan, perencanaan pembangunan, serta perencanaan tenaga kerja. Ada dua jenis informasi utama yang terkait dengan pasar tenaga kerja di Indonesia, yaitu data makro yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan data mikro yang dikumpulkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BPS mengumpulkan data melalui survei tenaga kerja yang mencakup berbagai aspek termasuk perkiraan angkatan kerja, ketenagakerjaan, dan pengangguran, serta menyediakan informasi tentang karakteristik pekerja termasuk ketenagakerjaan sektoral, pekerjaan, upah, jam kerja, serta status ketenagakerjaan. BPS juga melaksanakan survei tentang perusahaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengumpulkan data administratif tentang pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja melalui kantor layanan ketenagakerjaan publik dan swasta yang menyediakan layanan ketenagakerjaan secara online maupun secara tatap muka di Indonesia. Layanan-layanan ketenagakerjaan ini menyediakan fasilitas pendaftaran untuk mengumpulkan, memberi kode serta menyimpan informasi tentang pasar tenaga kerja.

Data administratif tentang karakteristik pencari kerja (suplai tenaga kerja) dan lowongan kerja (permintaan akan tenaga kerja) yang dikumpulkan layanan-layanan ketenagakerjaan menyediakan informasi penting untuk memantau hasil ketenagakerjaan di seluruh negeri. Sebagai contoh, data ini menyediakan informasi mengenai fluktuasi permintaan dan penawaran yang dapat memberi sinyal bagi intervensi kebijakan. Data ini dapat memberikan informasi mengenai adanya kesesuaian atau tidak antara latar belakang pendidikan para pencari kerja dengan harapan pengusaha terkait kualifikasi mereka. Data ini juga menyediakan informasi tentang pertumbuhan sektoral dan pekerjaan, serta hasilnya berdasarkan gender dan kelompok umur. Informasi ini dapat dibagikan dengan balai pendidikan dan pelatihan agar dapat mendukung penciptaan angkatan kerja yang “siap kerja”.

Tujuan dari paparan teknis ini adalah untuk mengadakan diskusi tentang informasi pasar tenaga kerja di Indonesia, dengan fokus utama pada data mikro yang diperoleh dinas tenaga kerja. Paparan ini menjelaskan tentang layanan ketenagakerjaan di Indonesia

serta melaporkan berbagai kecenderungan pengguna layanan ini. Paparan ini membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan kualitas data dan pemakaian data, untuk memberi rekomendasi tentang upaya yang perlu diambil agar dapat memperkuat informasi tentang pasar tenaga kerja di Indonesia.

Peraturan tentang layanan informasi pasar tenaga kerja di Indonesia

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk mengembangkan dan mengawasi dinas tenaga kerja dan sistem informasi pasar tenaga kerja sesuai ketentuan berikut ini:

- UU No. 7 Tahun 1981 mewajibkan semua pengusaha untuk memberikan informasi terkait ketenagakerjaan, termasuk lowongan kerja, kepada dinas yang mengurus persoalan ini.
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencakup semua bidang administrasi ketenagakerjaan termasuk sistem informasi pasar tenaga kerja dan layanan ketenagakerjaan.
- Konvensi ILO No. 88 Tahun 1948 yang telah diratifikasi Indonesia tahun 2002 dan menjamin penyediaan layanan ketenagakerjaan publik secara gratis untuk warga negara.

Layanan-layanan ketenagakerjaan di Indonesia

Layanan-layanan ketenagakerjaan mencocokkan pencari kerja dengan peluang kerja yang merupakan hal penting bagi pengoperasian pasar tenaga kerja. Tugas utama layanan ketenagakerjaan adalah membantu transisi pasar tenaga kerja bagi pekerja dan perusahaan dengan menyediakan informasi mengenai pasar tenaga kerja, membantu pencarian kerja serta penempatan tenaga kerja, dan menetapkan mekanisme referensi untuk jenis-jenis program pasar tenaga kerja yang lain.²

Di Indonesia, layanan ketenagakerjaan disediakan secara online serta melalui sistem administratif tradisional, dan bursa kerja (*job fair*). Layanan ketenagakerjaan juga disediakan oleh organisasi publik dan swasta.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyediakan dua perangkat online untuk mendukung pencarian kerja dan penempatan tenaga kerja, yang semuanya bebas biaya. Perangkat pertama dikenal sebagai situs “Info Pasar Kerja”, yang disediakan

¹ Paparan teknis disusun oleh Emma Allen dan Kee Beom Kim dan didukung oleh Program Kemitraan Korea/ILO. Paparan teknis ini disusun berdasarkan lokakarya teknis tentang proyeksi ketenagakerjaan dan informasi tentang pasar tenaga kerja, Jakarta, Juli 2014.

² Program-program pasar tenaga kerja yang lain dapat mencakup program ketenagakerjaan publik, subsidi ketenagakerjaan, program pelatihan dan program kewirausahaan.

Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja (BINAPENTA). Situs “Info Pasar Kerja” ini menyediakan halaman pendaftaran bagi setiap pencari kerja dan perusahaan, serta daftar interaktif tentang peluang kerja yang tersedia saat ini.

Gambar: Situs Info Pasar Kerja



Perangkat kedua adalah situs “Kios 3 in 1”, yang disediakan Direktorat Jenderal Pelatihan dan Produktivitas (BINLATTAS). Kios 3 in 1 ini terkait dengan balai pelatihan kerja (BLK) dan disediakan melalui BLK maupun secara online. Program “3 in 1” ini mengombinasikan pelatihan kerja dan sertifikasi keterampilan dengan layanan penempatan tenaga kerja.

Gambar: situs Kios 3 in 1



Di samping layanan online, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengadakan beberapa bursa kerja dan mendirikan kantor layanan ketenagakerjaan umum yang menyediakan kegiatan tatap muka interaktif bagi para pencari kerja dengan pengusaha. Pada tahun 2010, ada 441 kantor ketenagakerjaan publik di seluruh Indonesia.

Layanan ketenagakerjaan umum ini mengeluarkan kartu pencari kerja, yang disebut “kartu kuning”, yang diwajibkan oleh sejumlah pengusaha tertentu, terutama layanan sipil, sebagai persyaratan untuk melamar kerja. Layanan ketenagakerjaan umum ini juga memfokuskan upayanya membantu penempatan tenaga kerja di sektor perekonomian formal, dan tidak berhubungan dengan perekonomian informal melalui program penempatan kerja atau program pelatihan.

Dikarenakan meningkatnya kebutuhan untuk menyediakan layanan ketenagakerjaan yang efektif bagi beragam pasar tenaga

kerja, Indonesia mengizinkan sektor swasta untuk menjadi penyedia layanan ketenagakerjaan. Lembaga ketenagakerjaan swasta, yang disebut “Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta” (LPTKS) ini menyediakan layanan pencocokan pekerjaan atas persetujuan Kementerian Tenaga Kerja di tingkat nasional atau dari Gubernur di tingkat provinsi. Pemilihan penyedia layanan online ini juga menyediakan mesin pencarian yang mendukung pencarian kerja. Di samping itu, sektor swasta dan beberapa perguruan tinggi juga mengadakan bursa kerja guna membantu perusahaan dan pencari kerja sasaran, seperti para sarjana untuk ikut berinteraksi.

Pada tahun 2011, ada 97 LPTKS yang memiliki izin untuk menyediakan layanan pencocokan pekerjaan di Indonesia. Dari angka ini, 24 di antaranya ada di Kepulauan Riau, 19 di Jakarta, 9 di Papua dan 5 di Jawa Tengah. Lokasi LPTKS ini tidak ditentukan oleh jumlah pengangguran, formalitas pasar tenaga kerja, atau jumlah perusahaan besar. Tapi ditentukan oleh jumlah kabupaten dan jumlah penduduk. Lokasi LPTKS tampaknya juga dipengaruhi oleh akses terhadap internet. Sebagai contoh, jumlah LPTKS di Jawa Tengah lebih sedikit dibandingkan Papua dikarenakan jumlah pengguna layanan ketenagakerjaan online di Jawa Tengah (39) lebih besar dibandingkan Papua (1).

Kerjasama yang erat antara penyedia layanan ketenagakerjaan publik dengan swasta menjadi penting, karena informasi tentang lowongan kerja dan pencari kerja dapat digunakan untuk memberi sinyal yang dihubungkan dengan respons kebijakan dan reformasi pasar tenaga kerja yang terjadi dan balai pelatihan terkait. Meskipun demikian, kendati pendirian layanan ketenagakerjaan swasta ini diatur oleh pemerintah, hingga kini, kerjasama erat antara kedua jenis penyedia layanan ketenagakerjaan ini masih terbatas.

Kecenderungan global terkait layanan ketenagakerjaan³

Layanan ketenagakerjaan secara tradisional telah menyediakan layanan pencocokan pekerjaan dengan membantu penempatan para pencari kerja. Namun kini, layanan ketenagakerjaan telah menjadi layanan satu atap untuk mengakses berbagai layanan ketenagakerjaan. Sebagai contoh, banyak layanan ketenagakerjaan kini menyediakan mekanisme referensi, di mana para pencari kerja dapat mengakses program-program ketenagakerjaan publik, program pelatihan, program magang, dan program kewirausahaan melalui layanan ketenagakerjaan ini.

Sebagai contoh, Korea telah mengembangkan sistem layanan ketenagakerjaan terpadu yang diterapkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan, di mana 96 sentra pekerjaan dikelola oleh sekitar 4.000 penasehat ketenagakerjaan di seluruh negeri. Layanan ini mengelola asuransi pengangguran dan menyediakan berbagai layanan saran ketenagakerjaan, bantuan pencarian kerja serta layanan pencocokan pekerjaan. Layanan ini juga mengkoordinasikan akses atas program pengembangan keterampilan kerja dan program pasar tenaga kerja aktif lainnya.

Penyediaan berbagai layanan ketenagakerjaan melalui layanan satu atap ini memungkinkan kebijakan ketenagakerjaan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja. Layanan juga menyediakan mekanisme untuk menilai efisiensi dan efektivitas berbagai jenis intervensi pasar tenaga kerja dalam memfasilitasi hasil ketenagakerjaan.

3 Dinas Informasi Ketenagakerjaan Korea (2012) Pengembangan dan Evaluasi Layanan Ketenagakerjaan Publik di Korea Selatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Perburuhan, Seoul.

Kecenderungan pasar tenaga kerja dari pengguna layanan ketenagakerjaan

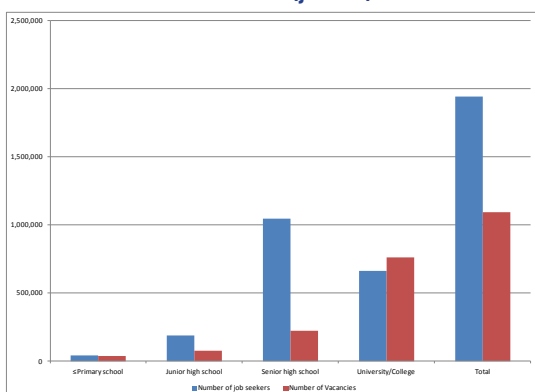
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengumpulkan data mengenai pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja melalui layanan ketenagakerjaan dan melalui sistem online. Sangat berguna menganalisa data seperti ini agar dapat lebih memahami profil pencari kerja dan lowongan kerja. Hal ini dapat memberi informasi mengenai munculnya persoalan-persoalan struktural di pasar tenaga kerja, seperti ketidakcocokan keterampilan, diskriminasi dan ketidaksetaraan secara regional.

Pada tahun 2011, jumlah pencari kerja yang terdaftar di dinas tenaga kerja adalah 1.941.434. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk yang diperkirakan menganggur sesuai data BPS tahun 2011, yaitu sebesar 8.319.779. Perbedaan antara jumlah pengangguran dan jumlah yang terdaftar di dinas tenaga kerja menunjukkan bahwa layanan ini memainkan peran yang terbatas dalam mengajak masyarakat untuk bekerja. Oleh karena itu, efektivitas data yang menyediakan informasi tentang konteks ketenagakerjaan dan ekonomi makro secara keseluruhan kemungkinan besar masih terbatas. Meskipun demikian, data yang ada menyediakan informasi penting mengenai pencari kerja yang menggunakan layanan ketenagakerjaan dan lowongan kerja.

Sebagai contoh, jumlah pencari kerja terdaftar yang memiliki gelar sarjana yang menggunakan layanan ketenagakerjaan menurun selama beberapa tahun belakangan ini. Hal ini mungkin dikarenakan adanya bursa kerja dan jenis bantuan pencarian kerja lain yang disediakan universitas, atau mungkin dikarenakan persaingan di kalangan penyedia layanan internet.

Analisa lebih lanjut tentang data yang diperoleh layanan ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia sebagian dikarenakan ketidakcocokan keterampilan pencari kerja terdaftar dengan lowongan kerja yang ditawarkan. Permintaan akan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi melampaui suplai tenaga kerja. Namun di sisi lain, ada pasokan tenaga kerja yang berlebihan di kalangan lulusan SMP dan SMA bila dibandingkan jumlah lowongan yang membutuhkan latar belakang pendidikan tersebut. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara tingkat pendidikan pencari kerja dengan kebutuhan lowongan kerja.

Gambar: Pencari kerja formal dan lowongan kerja tahun 2011 (jumlah)



Sumber: Dit. PKK Ditjen Binapenta.

Penelitian lebih lanjut di bidang ini menunjukkan bahwa ketidakcocokan keterampilan ini kemungkinan besar menjadi persoalan yang semakin besar di pasar tenaga kerja Indonesia.

Angka perkiraan menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang memiliki kualifikasi yang tidak memadai adalah sebesar 63 persen dari semua tenaga kerja dengan keterampilan tinggi (13,3 juta) di Indonesia tahun 2025.⁴ Kurangnya informasi mengenai pasar tenaga kerja dan rumitnya proses rekrutmen informal diperkirakan akan memperburuk tantangan yang ada.

Layanan ketenagakerjaan dapat memfasilitasi pengoperasian pasar tenaga kerja, terutama bagi kelompok rentan. Sebagai contoh, analisa menunjukkan bahwa perempuan rata-rata lebih berhasil dalam memperoleh pekerjaan dibandingkan laki-laki, dan hal ini menunjukkan bahwa layanan ketenagakerjaan publik dapat membantu memfasilitasi akses perempuan atas pekerjaan. Namun jika data tersebut dilihat lebih seksama, hasil yang dicapai tidak selalu lebih baik untuk perempuan. Sebagai contoh, pada tahun 2011, jumlah pencari kerja perempuan yang memiliki gelar sarjana lebih tinggi dibandingkan laki-laki, tapi pada kenyataannya lebih banyak laki-laki dengan latar pendidikan perguruan tinggi yang bekerja. Partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi kini meningkat namun tingkat pengangguran di kalangan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi juga lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa upaya lebih lanjut dibutuhkan untuk membantu perempuan dalam memperoleh pekerjaan.

Statistik lowongan pekerjaan

Sistem informasi pasar tenaga kerja di Indonesia saat ini kurang memiliki kerangka kerja pasar, yang mampu menyediakan analisa terperinci tentang fluktuasi pasar dalam hal permintaan dan penawaran. Untuk mendukung pembuat kebijakan, tindakan mungkin perlu dikembangkan untuk menyediakan informasi yang lebih baik tentang lowongan kerja, termasuk tingkat posisi yang lowong, tingkat lowongan kerja dan rasio antara jumlah pengangguran dengan lowongan kerja.

Indeks lowongan kerja juga dapat menyediakan informasi tentang potensi penurunan pertumbuhan ketenagakerjaan atau munculnya masalah di sektor dan pekerjaan yang ada di pasar tenaga kerja, di mana kedua masalah ini sangat membutuhkan respons kebijakan yang tepat. Angka statistik lowongan kerja menyediakan informasi mengenai permintaan kerja di pasar tenaga kerja dan membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang berisiko kekurangan sumber daya manusia, yang penting untuk balai pendidikan dan latihan kerja.

Proyeksi ketenagakerjaan sebagai bentuk informasi pasar tenaga kerja

Ketenagakerjaan di Indonesia diharapkan terus berkembang karena Indonesia memperoleh manfaat dari peningkatan jumlah penduduk yang merupakan bagian dari penduduk usia kerja yaitu dari 181,2 juta pada tahun 2014 menjadi 197,4 juta pada tahun 2019. Pencari kerja dan pendatang baru di pasar tenaga kerja membutuhkan informasi tentang sektor dan pekerjaan yang sedang berkembang, agar mereka dapat memilih karir yang tepat untuk masa depan mereka. Proyeksi ketenagakerjaan yang menyediakan informasi terperinci tentang pekerjaan menjadi penting untuk mendukung pilihan pribadi dan untuk mengembangkan angkatan kerja yang lebih produktif dan kompetitif. Sebagai contoh, proyeksi ketenagakerjaan di

4 ADB dan ILO (2014) Masyarakat ASEAN 2015: Mengelola integrasi untuk pekerjaan yang lain dan kesejahteraan bersama, Organisasi Perburuhan Internasional, Bangkok.

Indonesia menunjukkan bahwa permintaan di sektor jasa untuk kalangan profesional kemungkinan besar akan meningkat di masa mendatang. Penyedia layanan ketenagakerjaan, penasehat karir dan penyedia pelatihan perlu berbagi informasi tersebut dengan pelajar dan pencari kerja, agar mereka dapat mengembangkan keterampilan dan karir mereka di bidang-bidang yang banyak dibutuhkan.

Informasi tentang pasar tenaga kerja dan kualitas data

Pemerintah pusat serta pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki tanggung jawab bersama untuk mengelola sistem informasi pasar tenaga kerja di Indonesia. Walaupun kerangka hukum sudah ada untuk mendukung pengumpulan data tentang pencari kerja dan lowongan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja, namun data ini masih perlu dilengkapi. Di samping itu, pembagian data dari penyedia swasta cenderung masih terbatas.

Oleh karena itu, upaya lebih lanjut diperlukan untuk menyediakan sistem informasi pasar tenaga kerja yang terpadu di Indonesia. Dalam hal ini, ada beberapa masalah yang terkait dengan anggaran dan tata kelola. Sebagai contoh, pendanaan dari anggaran nasional digunakan untuk menyediakan bantuan bagi pemerintah daerah untuk mendukung pengumpulan, pengolahan dan pelaporan informasi tentang pasar tenaga kerja. Meskipun demikian, anggaran yang disediakan untuk mendukung pemerintah kabupaten ini masih terbatas dan anggaran nasional tidak dapat mencakup semua pemerintah kabupaten. Di samping itu, hanya ada sekitar 300 staf yang menangani layanan ketenagakerjaan di seluruh negeri, ini berarti sumber daya untuk layanan ini masih sangat kurang.

Di samping itu, kualitas data yang dikumpulkan dinas tenaga kerja dipengaruhi oleh desentralisasi dan mobilitas petugas layanan sipil. Pegawai pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi yang sudah diberi pelatihan telah dinaikkan pangkat dan diganti pegawai baru yang memiliki sedikit latar belakang tentang informasi pasar tenaga kerja. Akibatnya, pelatihan secara terus-menerus dibutuhkan di tingkat lokal untuk staf teknis yang baru.

Untuk meningkatkan layanan informasi tentang pasar tenaga kerja serta mengatasi tantangan yang terkait dengan desentralisasi, Direktorat Informasi Pasar Tenaga Kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah meningkatkan layanan informasi online tentang pasar tenaga kerja. Sejak tahun 2004, Kementerian ini telah menyediakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) untuk 497 kabupaten guna meningkatkan akses atas sistem pencarian kerja *online* di sektor layanan ketenagakerjaan publik. Ada kebutuhan untuk memasukkan informasi ke dalam perangkat *online* dan informasi yang dikumpulkan oleh dinas tenaga kerja agar lebih mudah, sehingga pemakaian informasi tentang pasar tenaga kerja untuk mendukung kebijakan dapat dioptimalkan.

Implikasi Kebijakan

Beberapa implikasi muncul dari kajian layanan ketenagakerjaan dan sistem informasi pasar tenaga kerja di Indonesia, termasuk:

- ♦ Rendahnya tingkat pemakaian layanan ketenagakerjaan. Untuk itu, kerjasama lebih lanjut antara Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi dengan dinas ketenagakerjaan dibutuhkan guna **meningkatkan pemakaian layanan ketenagakerjaan oleh para pencari kerja dan pengusaha** dengan meningkatkan akses ke sistem ini.

- ♦ Di samping itu, Kementerian dapat menyediakan kepemimpinan serta memperkuat **kerjasama dengan penyedia layanan swasta**, untuk memastikan layanan yang mereka sediakan memiliki kualitas yang diinginkan dan data dapat diperoleh dan dikirim tepat waktu ke Kementerian.
- ♦ Untuk mengembangkan lingkungan yang lebih kondusif bagi layanan ketenagakerjaan di Indonesia, Kementerian dapat mempertimbangkan pelaksanaan **kajian konteks hukum** guna memastikan bahwa layanan mengikuti praktik terbaik dan memfasilitasi pengoperasian lembaga-lembaga ini secara efektif.
- ♦ Informasi yang dikumpulkan oleh sistem informasi pasar tenaga kerja dapat menyediakan **kerangka kerja istimewa** bagi para pembuat kebijakan, terkait fluktuasi permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja. Dengan menggunakan informasi pasar tenaga kerja, para pembuat kebijakan dapat bersikap lebih responsif terhadap distorsi pasar tenaga kerja serta peluang dan tantangan ekonomi yang ada.
- ♦ Penguatan sistem informasi pasar tenaga kerja memungkinkan hasil ketenagakerjaan dapat **dipantau secara lebih dekat** Indonesia. Dalam hal ini, mungkin perlu dikaji “tingkat lowongan kerja” atau “proyeksi ketenagakerjaan” sebagai bagian dari sistem pemantauan ketenagakerjaan.

Di samping itu, sistem jaminan sosial dan layanan ketenagakerjaan tidak saling terkait di Indonesia. Secara khusus, Indonesia tidak menyediakan bantuan untuk pengangguran atau asuransi pengangguran. Ini berarti ada banyak pencari kerja potensial yang tidak punya insentif yang cukup untuk menggunakan layanan ketenagakerjaan publik, karena manfaat yang dirasakan masih minim. Untuk itu, layanan ketenagakerjaan dan jaminan sosial perlu saling terkait agar dapat bermanfaat dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan serta membuka mekanisme untuk memperluas perekonomian formal dan legitimisasi sistem perpajakan.

Layanan-layanan ketenagakerjaan juga dapat mempertimbangkan pengembangan dan penguatan hubungan dengan program-program pasar tenaga kerja yang lain, seperti program magang, pelatihan dan program penciptaan lapangan kerja, untuk meningkatkan kemampuan kerja para pencari kerja dan akses mereka atas dunia kerja. Dalam hal ini, kewajiban bersama perlu dibangun terkait akses ke berbagai program pasar tenaga kerja dan partisipasi dalam kegiatan pencarian kerja.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi

Emma Allen (allen@ilo.org)

Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste

Kee Beom Kim (kim@ilo.org)

Tim Teknis Pekerjaan Layak ILO untuk Kawasan Asia Timur, Asia Tenggara dan Pasifik

Kantor ILO Jakarta

Menara Thamrin Lantai 22,

Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 - Jakarta 10250

Telp. +62 21 391 3112; Faks. +62 21 310 0766

Email: jakarta@ilo.org; Website: www.ilo.org/jakarta